




## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ahmad Kusacri** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunagasahkan.

Surabaya, 25 Desember 2012  
Pembimbing,

  
**Drs. H. Stuis, M. Fil. I**  
**NIP./19620101199703/1003**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ahmad Kusaeri** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. Suis, M. Fil. I  
NIP. 1962011997031003

**Moch. Zainul Arifin, SAg., M. Pd.I**  
**NIP. 197104172007101004**

Penguji I,

Penguji II,

## Pembimbing

Drs. H. M.Faishol Munif M. Hum  
NIP. 195812301988021001

**Muh. Sholihuddin, MHI**  
**NIP. 197707252008011009**

Drs. H. Suis, M. Fil. I  
NIP. 1962011997031003

Surabaya, 25 Desember 2012

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ahmad Kusaeri

NIM : C03208042

**Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasaah Jinayah**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan PN  
Tentang Korupsi (Studi Kasus Korupsi APBD 2009  
Oleh Sekwan Di Kota Madiun)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Desember 2012

Saya yang menyatakan,



Ahmad Kusaeri  
C03208042

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif. untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pertimbangan Hakim PN Kota Madiun terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh sekretaris dewan DPRD Kota Madiun, Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi APBD 2009 Kabupaten Madiun oleh sekretaris Dewan tentag ikut serta melakuka tindak pidana korupsi, Dan bagaimana tinjauan pidana islam terhadap kasus korpsi tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan jenis bahan yang dipergunakan adalah bahan primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen yakni mengkaji isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, observasi, wawancara dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus Korupsi APBD Kabupaten Madiun, adalah tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primaer, namun terdakwa terbukti secara sah dalam dakwaan subsidaer

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana denda sebesar Rp. 50.000000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (*disubsidairkan*) dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dalam perspektif hukum pidana islam Saksi tindak pidana korupsi oleh SEKWAN Madiun disesuaikan dengan tindakan kejahatan yang dilakukannya. Artinya, kepada para pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, Disarankan kepada hakim yang beragama Islam dapat memutuskan hukuman bagi pelaku korupsi yang lebih mengarah pada hukum Islam, walaupun hukum Islam tidak dijalankan secara utuh di negara ini, tetapi negara Republik Indonesia mengakui keberadaan hukum Islam. Kepada masyarakat diharapkan untuk bersama-sama memberantas korupsi dan melaporkan jika ada individu yang melakukan korupsi demi kepentingan bersama.





| PERPUSTAKAAN                         |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA            |                        |
| No. KLAS<br>K<br>S 2012<br>043<br>SJ | No. REG : S2012/043/SJ |
|                                      | ASAL BUKU              |
|                                      | TANGGAL                |

## DAFTAR ISI

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| SAMPUL DALAM .....           | i   |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....    | ii  |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... | iii |
| PENGESAHAN.....              | iv  |
| ABSTRAK .....                | v   |
| MOTTO.....                   | vi  |
| KATA PENGANTAR .....         | vii |
| DAFTAR ISI .....             | ix  |
| DAFTAR TRANSLITERASI.....    | xii |

## BAB I PENDAHULUAN

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....                   | 1  |
| B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah ..... | 11 |
| C. Rumusan Masalah .....                          | 11 |
| D. Rumusan Masalah .....                          | 11 |
| E. Kajian Pustaka .....                           | 12 |
| F. Tujuan Penelitian .....                        | 14 |
| G. Definisi Operasional .....                     | 15 |
| H. Metode Penelitian.....                         | 16 |
| I. Sistematika Pembahasan.....                    | 22 |

## BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KAJIAN FIQIH JINAYAH

A. Selayang pandang tentang fiqih jinayah..... 22









tetapi hanya dapat dirasakan dampaknya. Dunia hantu merupakan sebuah ilusi-fantasi yang mengimplikasikan terhadap dunia ketidak jujur, kebohongan, dan hilangnya sebuah kepercayaan.<sup>2</sup>

Ketika mencari akar permasalahan dengan mempertanyakan mengapa korupsi tidak pernah padam bahkan selalu bertambah parah dengan gunung kasus yang tidak pernah jua terselesaikan secara adil. Alasan mendasar adalah karena telah terjadinya dekadensi moral dan iman di kalangan elit. Akhlak yang seharusnya mencerminkan orang berpendidikan dan berderajat tinggi, namun malah seakan menjelma seperti orang miskin yang mencuri harta orang lain untuk memenuhi urusan perutnya. Iman yang tidak terasah dengan benar, semakin menjadikannya budak harta yang kemudian melupakan Tuhannya. Mereka lebih cenderung mementingkan urusan duniawi dibanding mempertimbangkan dampak akhirnya. Sehingga mereka seakan tidak pernah takut dosa atas apa yang mereka lakukan. Padahal dalam agama Islam praktik seperti penggelapan uang maupun barang, suap-menyuap, maupun gratifikasi telah dilarang dengan tegas. Walaupun perbuatan ini tidak dikategorikan secara hudud maupun qisas, dimana ketentuannya dialihkan pada hukuman *ta'zir*. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hukuman *ta'zir* ini dapat pula berbentuk hukuman mati dimana pelaku korupsi dapat lenyap selamanya dan menjadi pelajaran bagi yang lain agar takut untuk berkorupsi.

<sup>2</sup> [ibrahim-muhlis.blogspot.com/./normal-0-false-false-false-en-us-x-n](http://ibrahim-muhlis.blogspot.com/./normal-0-false-false-false-en-us-x-n). Kamis, (03 Februari 2011)

[illegible]

*"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (QS. Al-Imran:161)*<sup>4</sup>

melakukan pengelolaan dan penyerahan keuangan biaya pemeliharaan kesehatan sebesar Rp. 346.000.000- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) bagi pimpinan dan anggota DPRD yang pembayarannya diberikan dengan nilai tetap setiap bulan , tanpa bukti pertanggung jawaban yang sah. Misalnya tidak didukung bukti pembayaran premi jaminan asuransi atau bukti yang mendukung telah dikeluarkannya biaya pengobatan atau check up yang seharusnya tunjangan tersebut diberikan apabila ada kegiatan kedinasan yang didukung dengan bukti tagihan dari pihak ketiga ( tagihan obat, tagihan pelayanan rumah sakit) sebagaimana diatur dalam pasal 27 pp No, 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Diantaranya juga terdakwa telah terbukti melakukan pengelolaan dan penyerahan keuangan biaya penunjang kegiatan sebesar Rp. 381.600.000,- ( tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang realisasi pengeluarannya berupa pembagian secara tunai kepada pimpinan anggota DPRD yang tidak jelas kegiatannya, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 27 pp No. 105 Tahun 2000.<sup>5</sup>

Indonesia pada dasarnya telah mengatur secara spesifik kejahatan korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan dalam ketentuan pidananya tertulis ancaman bagi pelaku korupsi adalah dihukum mati. Namun, pelaksanaan penegakkan undang-undang ini belumlah tercapai maksud dan tujuannya, barangkali kasus

<sup>5</sup> <http://an-nuur.org> korupsi-dalam-tinjauan-Fiqh. (05 Mei 2011)



















Judul yang penulis angkat "Tinjauan Fiqh Jiayah Terhadap Putusan PN Tentang Korupsi ( Studi Kasus Korupsi APBD 2009 Oleh Sekwan Di Madiun) ". berkaitan dengan judul tersebut. Penulis merasakan bahwa hal tersebut belum pernah di angkat dalam judul skripsi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Namun penulis juga menemukan karya yang juga mempunyai sedikit kesamaan dengan judul skripsi yang penulis tulis yaitu yang dilakukan oleh Achmad Masrukhin yang menuliskan tentang apa dan bagaimana rumusan korupsi menurut hukum Islam, dan bagaimana menurut UU. No3 dan no 31 th 71 dan UU No 31.th 99. Bagaimana proses penyidikannya menurut UU, no 3 th 71 dan No 31 th 99 serta bagaimana menurut KUHP, Serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penyidikan tindak pidana korupsi, dan karya ini dinyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan, memeriksa seluruh harta kekayaan pelaku untuk mendapatkan kejelasan tentang harta sendiri dan hasil korupsinya, kemudian dilakukan perbandingan dengan cara pemeriksaan yang ada dalam hukum Islam.<sup>14</sup> Juga dengan apa yang ditulis oleh Umi Zubaidah dalam karyanya bimbingan dan penyuluhan agama dengan trapsi realitas dalam mengatasi depresi. Studi kasus tentang seorang ibu yang suaminya korupsi yaitu seorang ibu yang suaminya pejabat, dan pidana karena melakukan tindak pidana

<sup>14</sup> Achmad Masruchin, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 3 Th 1971*, skripsi (IAIN, 2000, fak syari'ah<sup>5</sup>, jurusan SJ)

### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam menangani kasus sekretaris dewan DPRD Kota Madiun.

<sup>15</sup> Trisianto, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyelenggara Negara Serta Sanksinya*, skripsi IAIN sunan ampel surabaya 2007



Putusan PN Tentang Korupsi (Studi kasus Korupsi APBD 2009 Olch Sekwan di Kota Madiun.)” dengan nomor perkara **339/pid, sus 2010 Pn.Kd.Mn**, mengalami revisi judul beberapa kali namun di akhir ujian skripsi ditetapkan dengan judul tersebut.

Kasus yang penulis teliti yang sesuai dengan judul skripsi yang penulis angkat, menemukan di pengadilan Negri Madiun. Yang dimaksud dengan kasus korupsi APBD pada kasus tersebut adalah tindak pidana korupsi APBD, yang dilakukan secara berkelanjutan. Yang dilakukan oleh Ketua Dewan Kota Madiun yang kemudian dilanjutkan oleh sekretarisnya. Kasus korupsi yang tidak hanya dilakukan oleh seorang saja, Namun kasus tersebut juga dilakukan oleh sekretarisnya yang juga terlibat ikut serta melakukan. Sehingga amar putusan yang penulis teliti dalam kasus tersebut berbunyi “Turut Serta Melakukan Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut” Namun dalam penelitian disini penulis hanya fokus pada kasus yang dilakukan oleh sekretarisnya saja.

Yang dimaksud dengan kajian fiqh jinayah adalah, pada kasus tersebut penulis mencoba mempelajari antara pertimbangan hakim PN Kota Madiun dalam memutuskan perkara tersebut. dan bagaimana juga dalam kajian hukum positif dan hukum pidana Islam.

## H. Metode Penelitian

Upaya untuk mencapai kelengkapan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber penelitian yaitu:



- b. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dan skripsi-skripsi yang sedikit ada kesamaan dengan skripsi penulis misalnya karya Trisianto, *tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara serta sanksinya*, Skripsi IAIN sunan ampel surabaya, 2007.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk undang-undang statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>18</sup>

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu :

### a. Bahan Primer

Bahan primer yaitu bahan yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berupa undang-undang tindak pidana korupsi, putusan. Kemudian Wawancara, dimana wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim dan panitra yang menangani perkara tersebut, Sehingga akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting.

<sup>18</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)*, (Jakarta: Rineka Citra, Cet V, 2006)10









## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh.

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini memuat bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang didalamnya menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh data pembuatan skripsi ini dan sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika skripsi.

Bab II: Landasan Teori. Pada bab ini berisi studi teoritis mulai mengupas tentang tindak pidana korupsi dan penguraian dalam hukum pidana Islam

Bab III: Deskripsi. objek penelitian, Pada bab ini memuat deskripsi putusan PN Kota Madiun tentang kasus Korupsi APBD oleh Sekretaris Dewan Kota Madiun.

Bab IV: Analisis. Pada bab ini berisi tentang analisa hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi sekretaris dewan PN Kota Madiun.

Bab V: Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan penulis mengenai segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi.

## BAВ II

### A. Selayang Pandang Fiqh Jinayah

### 1. Pengertian Fiqh Jinayah

*Fiqh jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa (*etimologi*) berasal dari lafal *faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian *fiqh* secara istilah (*terminologi*) fiqh adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' praktis yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci.<sup>1</sup>

Adapun *jinayah* menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.<sup>2</sup> Sedangkan *jinayah* menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.<sup>3</sup>

Menurut istilah *fiqh*, *jinayah* adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang terhadap hak Allah atau larangan Allah ,hak-hak manusia dan hak

<sup>1</sup> Abdul wahab kallaf. Ilmu Ushul Al-Fiqh. Ad Dar Al Kuwaitiyah. (Cetakan VIII. 1968). 9

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Islam. Fiqh Jinayah* (jakarta:sinar grafika 2006) 11

<sup>3</sup> Abdul Qadir Audah. *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy. Dar Al Kitab Al Araby*, (Beirut, 1968) 6.



binatang di mana orang yang melakukan wajib mendapat/ diberi hukuman yang sesuai baik dunia maupun di akhirat. Dalam rumusan lain di sebutkan bahwa jinayah adalah perbuatan dosa besar atau kejahatan (pidana/ kriminal) seperti membunuh, melukai seseorang, atau membuat cacat anggota badan seseorang.<sup>4</sup> Keberadaan hukum jinayah dalam syariat Islam didasarkan kepada nash al-Qur'an antara lain adalah:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

*"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Al-Baqarah 179)"*<sup>5</sup>

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿١١﴾

*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan*

<sup>4</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. (jakarta:sinar grafika 2006). 527

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan Indonesia* (Bandung: PT Sygma.) 27



- a) Hukum pidana Islam lebih mengarah pada pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur, sehingga setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak akan selalu dicela dan diancam dengan hukum Islam. Sedangkan hukum positif, atau yang dikenal dengan undang-undang hanya mengarah pada apa yang menyebabkan kerugian secara langsung bagi perseorangan atau ketentraman masyarakat, dan tidak mengarah pada akhlak atau budi pekerti, sehingga jika tidak menimbulkan kerugian secara langsung, walaupun bertentangan dengan akhlak maka itu tidak dianggap tindakan pidana.
- b) Hukum positif (undang-undang) merupakan buatan/ produk manusia, sedangkan hukum pidana Islam bersumber dari Allah (wahyu) yang ditetapkan di dalam al-Qur'an dan al-sunah, yaitu *jarimah hudud dan jarimah qisash*. Ada pula hukum yang diserahkan kepada ulil amri, yaitu jarimah *ta'zir* dengan berpedoman Al-Qur'an dan Al-Sunnah<sup>9</sup>.

Dalam konteks ini pengertian jinayah sama dengan jarimah. Pengertian *jarimah* secara bahasa (*etimologi*) adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).<sup>10</sup> Sedangkan menurut istilah (*terminologi*) sebagaimana dikemukakan oleh imam al

<sup>9</sup> Ahmad wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika 2006). 8

<sup>10</sup> *ibid.* 9





badan. Adapun dalil yang mendasari hukukun *qisas* diantaranya adalah QS. Al-Maidah 45

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ  
تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٦﴾

- a) Pembunuh yang melakukan *Qisas* harus sudah dewasa, berakal, merdeka dan seagama.
- b) Qisas pada anggota-anggota badan harus sejenis, misalnya tangan dengan tangan dsb.<sup>16</sup>

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ

[illegible]



























Pada ayat tersebut kasus korupsi menurut penulis termasuk pada ayat tersebut, yaitu dalam mengambil harta saja, Perbuatan tersebut jelas-jelas telah menimbulkan kerugian negara, dan yang jelas mereka telah membuat kerusakan dimuka bumi. dan Pelakunya adalah orang-orang yang sudah melazimi bagi hukum,<sup>41</sup> dan sudah dianggap memenuhi syarat. yaitu harus dengan syarat sudah baligh, sadar dan mengetahui akan haramnya tindakan yang dilakukan (melawan hukum), terikat oleh hukum dengan artian tidak gila atau mabuk, tidak dalam keadaan darurat, kelaparan dan sebagainya. Dalam kasus korupsi yang dapat dikategorikan pada pencurian dengan pemberatan, dalam hukum Islam dapat dikenakan hukuman *hadd* yaitu pelakunya dalam bentuk badan usaha, pemegang perizinan dan perjanjian adalah termasuk pencurian dengan pemberatan atau *qath'ut al-Thariq* yang hukumannya adalah potong tangan dan potong kaki. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Syafii dari Ibnu Abbas yaitu :

إِنَّهُ قَالَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ : إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا يَأْخُذُوا الْمَالَ قَتَلُوا وَلَمْ  
يُصَلُّبُوا وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قَطَعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَاءِ الْمَالِ  
قُتِلُوا وَصَلُّبُوا وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ

*Artinya: Sesungguhnya Nabi berkata pada masalah qath ut at-Thariq Apabila mereka membunuh dan mengambil harta, bunuhlah dan saliblah mereka, apabila*

<sup>41</sup> Muhammad Mursafi, *Tahrir*, Jilid. IV ( Barut: Daral Fikri, ), 230

*mereka membunuh dan tidak mengambil harta, bunuhlah mereka dan jangan salibkan mereka dan apabila mereka mengambil harta dan tidak membunuh potonglah tangan – tangan dan kaki mereka dengan cara berselang seling.<sup>42</sup>*





#### **D. Pengertian Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi**

Suatu jarimah ada kalanya dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu jarimah maka perbuatannya itu disebut turut berbuat jarimh atau *AL-isytirak*. Turut seta melakukan jarimah itu ada dua macam:

- 1) Tutrut serta secara langsung . orang yang turut serta disebut peserta langsung
- 2) Turut serta tidak langsung. Orang yang turut serta disebut peserta tidak langsung atau sebab.

Turut serta secara langsung terjadi apa bila orang- orang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Pengetian melakukan jarimah dengan nyata disini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi, cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah itu. Misalnya dua orang (A dan B ) akan membunuh seseorang (C). A sudah memukul tekuk dengan sepotong sepotong kayu kemudian pergi, sedangkan B yang meneruskan sampai akhirnya C mati. Dalam contoh ini A tidak turut menyelesaikan jarimah tersebut, tetapi ia telah melakukan perbuatan yang



yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Mengenai pengertian korupsi tidak terbatas pada pengertian perusahaan saja tetapi juga harus diartikan sebagai institusi penyelenggara negara/daerah unit kerja tertentu. Berdasarkan pasal 55 KUHP pelaku korupsi yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah:

- 1) Orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu
- 2) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2) itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Surachmin, dan Subandi cahaya, *strategi dan tehnik korupsi mengetahui untuk mencegah* (jkarta:sinar grafika 2011) 31-32



### BAB III

## TINDAK PIDANA KORUPSI APBD YANG DILAKUKAN OLEH SEKRETARIS DEWAN DI KOTA MADIUN

### A. Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi Oleh Sekretaris Dewan PN Kota Madiun

Mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi APBD Kota Madiun, dalam hal ini, penulis mengambil data pembelaan dari tim panasehat hukum terdakwa yang disini juga disebutkan unsur-unsur apa saja tindak pidana korupsi oleh sekretaris dewan Kota Madiun dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang bunyinya sebagai berikut:<sup>1</sup>

#### 1. Unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan primair adalah:

Bahwa dalam perkara ini sebenarnya ketentuan pasal 27 pp No. 105 Tahun 2000 sebenarnya diperuntukan kepda siapa, siapa yang mengeluarkan APBD, siapa pihak yang menagih, siapa yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti mengeluarkan beban APBD, tidak bisa berlaku terhadap terdakwa merangkap pengguna anggaran/sekretaris DPRD;.

#### a. Unsur “Melawan Hukum”.

Bahwa perbuatan materiil yang didakwakan yaitu mengelola dan menyerahkan pos anggaran DPRD Kota Madiun kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Madiun tidak terbukti.

---

<sup>1</sup> Dokumen, Putusan PN Kota Madiun, *Kasus korupsi APBD 2009*. 237







Menimbang, bahwa meskipun secara *defakto* di dalam BAP maupun dari keterangan saksi dan terdakwa tidak ditegaskan bahwa terdakwa sebagai pengguna anggaran akan tetapi secara *de jure* berdasar aturan perundang-undangan (pp no.105 tahun 2000 dan kepmendagri no.29 tahun 2002) ditegaskan bahwa SEKWAN DPRD adalah sebagai pengguna anggaran pada kesekretan daerah. Dalam hal demikian dihubungkan dengan unsur dari perbuatan yang didakwakan pasal 3 adanya sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dapat dibuktikan dengan tidak di taatinya aturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas, dan argumentasi sebagaimana yang disampaikan dalam pledio atau keterangan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai alasan yang dapat menghapus/meniadakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa tidak menghapuskan sifat melawan hukum, maka majelis berpendapat bahwa dengan menerapkan teori sifat melawan hukum formil dengan tendensi positif, maka perbuatan terdakwa secara *de jure* telah memenuhi unsur melawan hukum dalam uraian pasal 3 diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan subsidier tersebut diatas telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI YANG









16. 1 (satu) buah buku agenda masuk tahun 2003
17. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima anggaran pengembalia hasil temuan BPK, RI tahun 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah ) tanggal 15 agustus 2005 Aa. KOKOK RAYA, SH.
18. 1 (satu) bendel foto copy SK Gubernur jatim No. : 171.401/43/011/2004 tanggal 14 agustus 2004 , tntang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat dacrah Kota Madiun.
19. Buku kas umum DPRD Kota Madiun tahun 2002, 2003 dan 2004.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara. lain (wisnu suwanto ewo bin somowiryo, dkk. Dan djoko santoso bin mohammad misran, dkk). Sedang surat-surat bukti yang diajukan oleh terdakwa melalui panasehat hukumnya yaitu:

1. Surat dakwaan No Reg.perk : PDS-01/Mdn/Ft.1/01/2010 atas nama terdakwa TEGUH SANTOSO, (tanda bukti T-I) ;
2. Surat dakwaan No. Reg. Perk : PDS -02/Mdn/Ft.1/01/2010 atas nama terdakwa : terdakwa 1 : ALI SAHONO, BA bin SADIJOEN RANOE ATMODJO, terdakwa II : GANDHI YOENINTA, SH.Mhum bin TRISNO SUDIRO, (tanda bukti T-II)

3. Surat Dakwaan No. Reg.perkara : PDS-05/Mdn/Ft.1/11/2010 atas nama terdakwa WISNU SUWRTO DEWO bin SOMOWIRYO, dkk. (Tanda bukti T-III);
4. Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS -06/Mdn/ft.1/11/2010 atas nama terdakwa DJIKO SANTOSO bin MOCHMMAD MISRAN, dkk. (tanda bukti T-IV);
5. Peraturan Daerah No.5 tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD, (tanda bukti T-V)
6. Surat keputusan waliKota Madiun No.24 Tahun 2001 tentang Uraian tugas jabatan pada sekretariat daerah dan sekretaris DPRD, (Tanda bukti T-VI) Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Kota Madiun pada hari jum'at tanggal 29 APRIL, 2011 oleh NANIK HANDAYANI, SH,MH, sebagai Hakim ketua Majelis, ARIF BUDI CAHYONO, SH.RUSTANTO, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 3 MEI 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis didampingi oleh hakim anggota yang sama, dibantu oleh MARJAKA, SH. Dan SYAMSUL HADI EFENDI,SH. Sebagai panitera pengganti serta







**PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI APBD 2009 DI PN MADIUN DALAM  
KAJIAN FIQH JINAYAH**

Madiun merupakan suatu wilayah yang dirintis oleh ki Panembahan Jongo Jumeno atau biasa disebut ki Ageng Ronggo. Asal kata Madiun dapat di maknai “pertama” secara segi bahasa Madiun (hantu) dan ayun-ayun (berayun) maksudnya adalah bahwa ketika Ronggo Jumeno melakukan badad tanah Madiun terjadi banyak hantu yang berkeliaran. “kedua” karena nama keris yang digunakan oleh ronggo jumeno yaitu keris tunding Madiun. Namun pada mulanya bukan dinamakan Madiun, tetapi wonosari.

Beberapa peninggalan kerajaan Madiun salah satunya dapat dilihat di keurahan kuncen, dimana terdapat makam ki Ageng Pancambahan Ronggo

Jumeno, Patih Wonosari selain para makam Bupati Madiun, Masjid tertua di Madiun yaitu masjid Nur Hidayatullah, artefak-artefak disekeliling Masjid, serta serta sendang (tempat pemandian )keramat.

Kota Madiun dulu merupakan pusat dari kapresidenan Madiun, yang meliputi wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa Timur, secara kultural Madiun lebih dekat ke budaya Jawa Tengah (Solo-Jogja), karena lebih dekat secara geografis.

Untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, awalnya terdiri dari wilayah hukum 2 (dua) kabupaten yaitu: kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Dengan adanya pemekaran daerah pada tahun 1985 wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamadya Madiun hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dengan masing-masing kecamatan 9 (Sembilan) kelurahan, dengan demikian wilayah hukum pengadilan negeri kabupaten yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.

## B. Unsur-unsur Korupsi Menurut Hukum Islam

Dalam literatur Islam secara umum tidak ditemukan sebuah istilah yang mengandung makna korupsi secara menyeluruh. Namun demikian, berdasarkan tindakan-tindakan yang dikategorikan korupsi dalam hukum





- e. Unsur “yang menyuruh melakukan atau turut melakukmelakukan”

Jadi menurut penulis dari beberapa unsur korupsi yang dilakukan oleh SEKWAN Madiun disini, yang juga penulis sesuaikan dengan pertimbangan hakim, yaitu diterimanya dakwaan *subsidaer*, maka menurut penulis memang sudah layak dikatakan bahwa perbuatannya tersebut sudah termasuk dalam unsur-unsur korupsi menurut hukum pidana Islam. Salah satu contoh misalnya unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” dalam hukum Islam unsur-unsur yang ada kesamaan dengan unsur tersebut adalah “Adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik”

### C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Apbd 2009 Dalam PN Madiun

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Kota Madiun yang dilakuka oleh mantan SEKWAN Madiun, oleh hakim PN Madiun yaitu tidak terlepas dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu tersangka didakwa pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana jo. Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP undang-undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. sehingga amar putusan kasus terdakwa pidana korupsi Kota Madiun berbaunyi:







*" Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya- dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar"<sup>9</sup>*

Hadd dikenakan karena melanggar ketetapan Allah SWT dan Sunnah Rasul SAW, hal ini sesuai dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya. Apabila pengelolaan harta atau benda negara tidak digunakan secara baik, maka yang terjadi adalah kerugian negara dan merugikan banyak pihak serta mengakibatkan dampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat.

## 2. Ta'zīr

Jika harta, uang atau benda milik negara dipergunakan dikarenakan kebutuhan, maka pelakunya hanya dikenai hukuman *ta'zīr* dan apabila barang curian masih ada didapati pada diri pelaku, maka wajib dikembalikan.<sup>8</sup> Sebagian ulama menyatakan, pelakunya wajib membayar harga barang yang dicurinya. Jika barang yang ditemukan ternyata memenuhi nisab, maka pelakunya dipotong tangan dan tidak wajib dikenai hukuman *ta'zīr*.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan Indonesia* (Bandung: PT Sygma.) 113

<sup>8</sup> Hasbie ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2, 2001), 47.

<sup>9</sup> Kahar Mansyur, *Bulughul Maran*, Jilid II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 220.





























Syamsuddin Mu Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Khatib Syarbaini, Muqzni  
Muhtaj ila Ma'rifah

Trisianto, *tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap tindak pidana korupsi*  
oleh *penyelenggara negara serta sanksinya*, Skripsi IAIN sunan ampel  
surabaya, 2007.

Tara mizi, at,al, ukuran takaran/ sukatan, jarak/luas dan timbangan dalam hukum syara'i menurut standarisasi internasional, Samalanga : LPI Mudi Mesra Samalanga, 2006

Hasbie ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra,  
Cet. Ke-2, 2001

Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<http://an-nuur.org/2011/05/korupsi-dalam-tinjauan-fiqih-islam/>

[http://prasko.com/pengertian-tindak pidana/htm/](http://prasko.com/pengertian-tindak-pidana/htm/) (05 Mei 2011)

w.lawskripsi.com/index.php?option=com\_content.id. (19 Juli 2012)

ibrahim-muhlis.blogspot.com/./normal-0-false-false-false-en-us-x-n.